



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

Jl. Bagindo Azis Chan Kelurahan Sungai Durian Telp. (0752) 93300

PAYAKUMBUH – 26219

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh

TAHUN ANGGARAN : 2027

PROGRAM	: PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KEGIATAN	: Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
SUB KEGIATAN	: Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
KODE KEGIATAN	: 7.01.02.2.01.01
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) ▪ Unsur Masyarakat yang Terlibat: Masyarakat (RT/ RW/ Faskel), Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda) ▪ Proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangkau informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien. ▪ Persentase Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2026 adalah 59 orang (39,86%) dan Laki-laki 89 orang (60,14%) 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan ▪ Aspek Akses setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kandung dan KAN 3 Nagari Lampasi diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki ▪ Aspek Kontrol/ Kewenangan Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2026, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan perbandingan kehadiran antara perempuan dan laki-laki adalah 1:2. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat RW dan tingkat Kelurahan. ▪ Aspek Partisipasi Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. ▪ Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan

		masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi "kurang bermanfaat" bagi perempuan. b. Penyebab Internal - Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusataman Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat; - SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender. c. Penyebab Eksternal - Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan; - Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; - Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas; - Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.	
RENCANA TINDAK	Kegiatan	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Mufakat RW, Musrenbang Kelurahan, dan Musrenbang Kecamatan) yang responsif Gender.	
		Tujuan	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender
		Aktifitas	a. Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan b. Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamaan gender
SUMBER DANA	:	Rp. 35.000.000,-	
OUTCOMES	:	Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat RW, Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas.	

Payakumbuh, 26 Maret 2026
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI



ATEMUGIARAE, S.STP., M.M.
 NIP. 198707012006022001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

Jl. Bagindo Azis Chan Kelurahan Sungai Durian Telp. (0752) 93300
PAYAKUMBUH – 26219

GENDER BUDGET STATEMENT PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

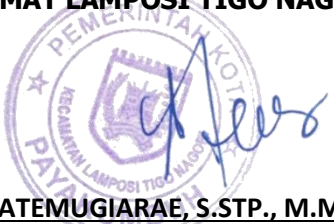
OPD : KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

TAHUN ANGGARAN : 2027

Program	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Kode Kegiatan	7.01.03.2.03.01
Analisis Situasi	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, koordinasi dengan pihak pihak terkait dan lomba - lomba tingkat kecamatan sampai dengan tingkat propinsi Kegiatan ini ditujukan untuk lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yaitu LPM dan PKK, Kepengurusan LPM didominasi oleh laki-laki dengan keanggotaan 13 laki-laki dan 1 perempuan, Kepengurusan PKK didominasi oleh Perempuan dengan keanggotaan 29 perempuan dan 1 laki-laki 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan LPM dalam kepengurusannya lebih dominan laki-laki, sedangkan PKK dalam Pengengurusannya didominasi oleh Perempuan sehingga menimbulkan kesenjangan. b. Faktor Kesenjangan Internal OPD : • LPM : LPM dalam menjalankan kegiatannya sering dilaksanakan pada malam hari sehingga kurang memungkinkan untuk perempuan ikut serta sehingga dalam pengambilan keputusan kurang memperhatikan kepentingan perempuan. • PKK : PKK dalam menjalankan kegiatan hanya melibatkan perempuan karena sebagian besar kegiatannya bersentuhan langsung dengan perempuan. • RT/RW : Dalam menjalankan kegiatannya di dominasi oleh laki laki

	karena akan menghadapi berbagai permasalahan di lingkungan c. Faktor Kesenjangan Eksternal OPD : • Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, bahwa gender adalah mendahulukan perempuan; • Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; • Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan. • Adanya Pemikiran bahwa Pengurusan PKK merupakan bagian tanggung Jawab dari Perempuan dan kegiatannya bersentuhan langsung dengan perempuan sehingga pengurusan kepengurusan di dominasi perempuan		
Rencana Tindak	Kegiatan		
		Tujuan	Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dengan keterlibatan laki2 dan perempuan yang proporsional
		Aktivitas	1. Dalam Penetapan SK Kepengurusan LPM, PKK, RT/RW memperhatikan Persentase Keikutserataan Laki Laki dan perempuan yang seimbang 2. Pelaksanaan Pembinaan dan Rapat Koordinasi Secara berkala 3. Optimalisasi Peran Laki - laki dan perempuan dalam pelaksanaan Kegiatan baik itu di Lingkup PKK LPM ataupun RT /RW
Sumber Dana	Rp. 174.970.949,-		
Dampak / Hasil / Manfaat	outcomes: Terakomodirnya keterlibatan laki laki dan perempuan dalam meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan		

Payakumbuh, 26 Maret 2026
CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI



ATEMUGIARAE, S.STP., M.M.
NIP. 198707012006022001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

Jl. Bagindo Azis Chan Kelurahan Sungai Durian Telp. (0752) 93300
PAYAKUMBUH – 26219

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2027

KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan /Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Program :								
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, koordinasi dengan pihak pihak terkait dan lomba - lomba tingkat kecamatan sampai dengan tingkat propinsi 2. Kegiatan ini ditujukan untuk lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yaitu LPM dan PKK, Kepengurusan LPM didominasi oleh laki-laki dengan keanggotaan 13 laki-laki dan 1 perempuan, Kepengurusan PKK didominasi oleh Perempuan dengan keanggotaan 29 perempuan dan 1 laki-laki	LPM dalam kepengurusannya lebih dominan laki-laki sehingga menimbulkan kesenjangan. PKK dalam Pengengurusannya didominasi oleh Perempuan.	1)LPM : LPM dalam menjalankan kegiatannya sering dilaksanakan pada malam hari sehingga kurang memungkinkan untuk perempuan ikut serta sehingga dalam pengambilan keputusan kurang memperhatikan kepentingan perempuan. 2)PKK : PKK dalam menjalankan kegiatan hanya melibatkan perempuan karena sebagian besar kegiatannya bersentuhan langsung dengan perempuan.	1 Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, bahwa gender adalah mendahulukan perempuan; 2 Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal yang publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; 3 Terbatasnya akses dan kapasitas perempuan. 4 Adanya Pemikiran bahwa Pengurusan PKK merupakan bagian tanggung Jawab dari Perempuan dan kegiatannya bersentuhan lansung dengan perempuan sehingga pengusulan kepengurusan di dominasi perempuan	Tujuan : Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan dengan keterlibatan laki2 dan perempuan yang proporsional	1. Dalam Penetapan SK Kepengurusan LPM, PKK, RT/RW memperhatikan Persentase Keikutserataan Laki Laki dan perempuan yang seimbang 2. Pelaksanaan Pembinaan dan Rapat Koordinasi Secara berkala 3. Optimalisasi Peran Laki - laki dan perempuan dalam pelaksanaan Kegiatan baik itu di Lingkup PKK LPM ataupun RT /RW	input : Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori <	

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan /Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Program :								
Tujuan : Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan							outcomes: Terakomodirnya keterlibatan laki laki dan perempuan dalam meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan	outcomes: Terakomodirnya keterlibatan laki laki dan perempuan dalam meningkatkan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan

Payakumbuh, 26 Maret 2026
CAMAT LAMFCSI / CC NAGORI

ATEMUGLAKA, S.STP., M.M.
NIP. 198707012006022001



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

Jl. Bagindo Azis Chan Kelurahan Sungai Durian Telp. (0752) 93300
PAYAKUMBUH – 26219

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) TAHUN 2027

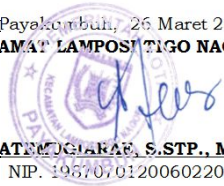
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/ Data Dasar Base Line	Target Kinerja/ Indikator Gender
Program :								
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Unsur Masyarakat yang Terlibat: Masyarakat (RT/ RW/ Faskel), Perwakilan Perempuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Pemuda) - Proses perencanaan pembangunan dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dengan proses Mufakat RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang bertujuan untuk menjangring informasi kebutuhan pembangunan di tingkat bawah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran, efektif dan efisien. Kehadiran Perempuan pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2025 adalah 60 orang dan Laki-laki 101 orang	- Aspek Akses setiap unsur masyarakat, baik dari perempuan, tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang dan KAN 3 Nagari Lampasi diundang. Namun sebagian besar peserta yang hadir adalah laki-laki - Aspek Kontrol/ Kewenangan Berdasarkan data pelaksanaan Musrenbang Tahun 2025, terlihat bahwa mayoritas peserta yang hadir adalah Laki-laki dimana untuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan persentase kehadiran perempuan 37,27% dan laki-laki 62,73%. Kurangnya jumlah perempuan yang hadir, mengakibatkan rendahnya kontrol dari perempuan dalam menentukan prioritas pada tingkat RW dan tingkat Kelurahan. - Aspek Partisipasi Keterlibatan perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang yang bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. - Aspek Manfaat Secara umum dari pelaksanaan Proses Musrenbang, terlihat bahwa Perempuan cenderung mengusulkan pembangunan terkait pemberdayaan masyarakat ataupun pendampingan/ pelatihan usaha rumah tangga, ataupun terkait dengan sosial budaya, pendidikan dsb. Sedangkan Laki-laki mayoritas mengusulkan pembangunan fisik, jalan, irigasi, drainase ataupun jembatan. Kondisi ini ketika tidak didukung oleh partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran pada saat menentukan	1. Budaya Kerja, dimana pemahaman gender tidak didukung melalui kebijakan Pengarusataman Gender di lingkungan pemerintah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada masyarakat; 2. SOP dalam perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang belum Responsif Gender.	1 Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang gender, dimana gender dipahami sebagai mendahulukan perempuan; 2 Adanya budaya patriarki yang masih mengutamakan kaum pria dalam hal-hal publik seperti menjadi kepala keluarga, kepala desa, ketua kelompok, tokoh masyarakat dll; 3 Kurang Koordinasi antar lembaga; Perencana, Pelaksana dan Pengawas; 4 Terbatasnya kapasitas dan rendahnya kepercayaan diri perempuan.	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender	a. Menetapkan peserta musrenbang dengan memperhatikan keterwakilan peserta laki-laki dan perempuan b. Dalam penyusunan skala prioritas usulan kecamatan memperhatikan konsep pengarusutamakan gender	input : Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Mufakat RW, Murenbang Tk Kelurahan dan Kecamatan) output: Terlaksananya Musrenbang kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan	input : Terakomodirnya rencana pembangunan di Tingkat RW, Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas. output: Terlaksananya musrenbang Tk. Kecamatan
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan /Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Program :								
Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinergis dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender		prioritas mengakibatkan pembangunan yang dilakukan menjadi “kurang bermanfaat” bagi perempuan.					outcomes: Terakomodirnya usulan perencanaan pembangunan yang responsif gender menjadi skala prioritas kecamatan	outcomes: Terakomodirnya perencanaan Tk. Kelurahan dan Kecamatan

Payakumbuh, 26 Maret 2026

CAMAT LAMPOSUTIGO NAGORI



ATMUGRAH, S.STP., M.M.

NIP. 195707012006022001